

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA
KERJA PEREMPUAN UNTUK MENJAMIN HAK-
HAK DASAR PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Oleh
ANDHIKA PRAYOGA
41151010160091

Tugas akhir/skripsi

**Untuk memenuhi salah syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***IMPLEMENTATION OF THE LEGAL PROTECTION
OF FEMALE MANPOWER TO GUARANTEE THE
BASIC RIGHTS OF WORKERS BASED ON LAW
NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING LABOR***

By
ANDHIKA PRAYOGA
41151010160091

Thesis assignment

*To qualify for a law
degree in law study programs*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andhika Prayoga

NPM : 41151010160091

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA PEREMPUAN
UNTUK MENJAMIN HAK-HAK
DASAR PEKERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai 6000

Andhika Prayoga
41151010160091

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Pembimbing

Hana Krisnamurti, S.H., M.H

ABSTRAK

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja perempuan demi mendapatkan hak khusus pekerja perempuan yang harus diberikan karena perempuan memiliki fungsi reproduksi yang harus dijaga demi kesehatannya dan tidak mengganggu produktifitas kerja, Maka diadakannya hak khusus bagi pekerja perempuan. Namun demikian, masih saja terjadi permasalahan pelaksanaan yang harus diperbaiki. Hal ini disebabkan karena, kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan kepada para pekerja yang menerangkan tentang hak – hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai hak- hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja/buruh perempuan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan untuk mengetahui upaya hukum bagi Pekerja terkait pemenuhan haknya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yuridis normatif yakni merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dimana dalam menganalisis dan meneliti tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja khususnya perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan berdasarkan buku-buku tentang hukum dan peraturan-peraturan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah..

Pelaksanaan perlindungan Hukum bagi pekerja perempuan terkait mengenai pemenuhan hak-hak khusus bagi perempuan yang dikarenakan mempunyai fungsi reproduksi yang harus di perhatikan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja perempuan mengenai pemberian hak-hak khusus pekerja perempuan, tindakan yang harus dilakukan pekerja yaitu melakukannya perundingan antara pihak pekerja dan pihak perusahaan agar mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya, namun apabila penyelesaiannya tidak mencapai kata sepakat maka harus melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator bisa melalui mediasi, konsilliasi, dan arbitrase, dan apabila salah satu pihak menolak anjuran mediator dan konsiliator, langkah terakhir dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh pekerja yaitu meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membentuk serikat pekerja/serikat buruh, lembaga

ABSTRACT

In order to guarantee the protection of female workers in order to obtain special rights for women workers which must be given because women have reproductive functions that must be maintained for their health and do not interfere with work productivity, special rights are given for women workers. However, there are still implementation problems that need to be fixed. This is due to the lack of outreach from the company to the workers explaining the rights and obligations they are supposed to receive which results in a lack of knowledge of workers about the rights and obligations they should get. This study aims to determine the protection of women workers / laborers based on Law Number 13 of 2003 and to find out legal remedies for workers related to the fulfillment of their rights under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

The preparation of this thesis uses the type of approach used in this research, which is carried out by means of juridical normative, juridical normative, namely library research, namely research on secondary data. Where in analyzing and researching the Implementation of Labor Law Protection, especially women based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower based on books on laws and legal regulations that have been set by the government.

The implementation of legal protection for women workers is related to the fulfillment of special rights for women who have reproductive functions that must be considered. There are still many violations committed by companies against women workers regarding the granting of special rights to women workers, actions that workers must take are negotiating between workers and company parties in order to reach an agreement on the settlement, but if the settlement does not reach an agreement then it must involve parties third, as a facilitator, it can go through mediation, conciliation and arbitration, and if one of the parties rejects the suggestion of the mediator and conciliator, the final step can be to file a lawsuit at the Industrial Relations Office. This is also in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. the legal remedies that must be taken by workers include the following steps, namely forming a trade union/labor union, a bipartite cooperation institution, a tripartite cooperation institution, and finally through an industrial relations court

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN UNTUK MENJAMIN HAK-HAK DASAR PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.** Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini.

penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Segenap Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Teman seperjuangan Kelas B1 dan B2 angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Iman Nirman Hidayat dan Ibu Pipit Nurpiati yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, 08 Oktober 2020

Penulis

Andhika Prayoga

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	13

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA DAN

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PEREMPUAN

A. Perjanjian Kerja	17
1. Pengertian Perjanjian Kerja	17
2. Syarat Sah nya Perjanjian Kerja	21
3. Macam-macam Perjanjian Kerja	22
4. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	24
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja	25

B. Tenaga Kerja	26
1. Pengertian Tenaga Kerja	26
2. Macam-macam Tenaga Kerja	28
3. Dasar Hukum Yang Mengatur Tenaga Kerja	29
4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja	30
C. Perlindungan Kerja	31
1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja dan Tujuan Perlindungan Kerja	31
2. Macam-macam perlindungan kerja	32
3. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak	33
4. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perempuan	34

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK CUTI HAID, DAN CUTI MELAHIRKAN PEKERJA PEREMPUAN YANG MASIH DI ABAIKAN

A. Hasil Survei Online Tim Jaringan Indonesia Untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) Mengenai Hak Cuti Haid	51
B. Pelanggaran Pelaksanaan Cuti Melahirka Di Bantargebang Bekasi	53

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN UNTUK MENJAMIN HAK-HAK DASAR PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

A. Pelaksanaa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan.....	56
B. Upaya Hukum Bagi Pekerja Terkait Pemenuhan Haknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP